

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Madrasah diniyah merupakan Pendidikan yang memprioritaskan pembelajaran pengetahuan agama dan moral. Madrasah diniyah dilaksanakan secara mandiri oleh tiap-tiap penyelenggaranya, seperti telah disepakati bahwa madrasah diniyah yang disinggkat dengan madin, di santero dunia telah dilaksanakan khususnya di Indonesia. Hadirnya madrasah diniyah dikonsepsi dengan klasikal bukanlah sesuatu yang baru. Sebab, emberio pendidikan keislaman, serupa madrasah diniyah seperti saat ini sudah lama terlaksana di lingkungan pendidikan keislaman seperti langgar, pesantren dan pondok pesantren, dan kegiatan-kegiatan keagamaan di Indonesia. Asal muasal pendidikan keislaman, seperti pendidikan madrasah diniyah tidak bisa lepas dari lembaga pendidikan keislaman tradisional yang sudah ada bersamaan dengan islamisasi di bumi pertiwi ini.

Lembaga pendidikan islam berkembang di nusantara jauh sebelum indonesia merdeka,¹ para sejarawan sepakat bahwa lahirnya pendidikan diniyah atau keagaan islam di nusantara muncul sekitar abad ke – 18 dan banyak berdiri direntang abad ke-19.² Sementara madrasah diniyah yang dilaksanakan di tiap-tiap lembaga mempunyai banyak perbedaan dengan pendidikan umum bahkan dengan pendidikan formal lainnya, seperti madrasah

¹MH.Said Abdullah (2007). *Pesantren, Jati Diri dan Pecerahan Masyarakat*, Said Abdullah Institut Publising, Jakarta, hlm. 8

²<http://www.saidabdullah.com/hub%20saya.php> (20 Oktober 2010)

ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah dan seterusnya. Perbedaan materi ajar dan penerapannya di madrasah diniyah dilakukan tanpa menggunakan perangkat ajar layaknya pendidikan formal. Semua materi yang diajarkan di madrasah diniyah didominasi pengetahuan agama.

Dalam Peraturan pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Sesuai isi pasal 1 ayat 1 dan 2, yang dimaksud dengan pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, jenis pendidikan.

Oleh karena itu, pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.³

Pegerakan madrasah diniyah dari tahun ke tahun memberi ruang perubahan sistem dan mekanisme pelaksanaan madin. Sedikit demi sedikit sajian materi dan regulasi madrasah diniyah mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Sehingga, sampai saat ini wajah madrasah diniyah semakin sempurna. Yaitu, mampu bersinergi dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan secara nasional dan kemasannya lebih profesional.

Namun seperti apapun kondisi madrasah diniyah saat ini tak bisa lepas dari sejarah panjang madrasah diniyah yang dinilai sebagai pusat transformasi

³ Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55 Tahun 2007 Tentang pendidikan Agama dan Keagamaan

materi agama dan moralitas. Pondok pesantren merupakan lembaga paling sentral yang dinilai memiliki peran penting lahirnya madrasah diniyah. Hal itu melihat tekstur madrasah diniyah menjadi implementasi dari setiap materi agama yang diajarkan di pondok pesantren. Pendidikan diniyah berkembang tanpa ada dukungan fasilitas dan sarana prasarana yang memadai semua tenaga pengajar dengan semangat untuk mendukung kemajuan lembaganya.⁴Faktor –faktor segmental merupakan hal yang melatarbelakangi lahirnya madrasah diniyah dan mendorong agar keberadaan madrasah diniyah juga dibaca dan dihadirkan ke tengah dunia pendidikan nasional. Baik dalam persoalan teknis manajemen, regulasi, dan distribusi lulusannya. Salah satu faktor utama adalah melihat situasi dan kondisi moralitas di kalangan anak semakin mengkhawatirkan. Pengetahuan agama dan moralitas penting disematkan kepada semua anak di kawasan tanah air. Menurut Muhaimin⁵ bahwa Madrasah Diniyah merupakan tempat untuk mencerdaskan para peserta didik, serta menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan mereka sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Persoalan moral dan pemahaman agama menjadi bagian tak terpisahkan dari keberadaan madrasah diniyah. Secara sistemik madrasah diniyah mengakomodir setiap kebijakan pendidikan nasional. Sehingga,

⁴NidhomulHaq “*Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*” (Volume 4 Nomor 4 tahun 2019 hal : 249

⁵Muhaimin seperti dikutip oleh M. Jamhuri. “*Upaya Pendidikan Madrasah Diniyah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Materi Fiqih di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Pruten Ngembal Pasuruan*” dalam *Jurnal Al-Murabbi*. Volume 2, Nomor 2, Juni 2017. <http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/paihlm>. 315

perjalanan dan perannya selaras dengan tujuan dari pendidikan nasional Republik Indonesia. Kegiatan pembelajaran yang diberlaangsungkan di madrasah diniyah yang terpusat pada pemantapan pemahaman keagamaan pada akhirnya memangantarkan anak bisa mempraktikkannya dengan baik dan benar. Konsepsi pemahaman keagamaan yang didapatkan dari madrasah diniyah menjadi karakter bagi anak menyongsong kehidupan selanjutnya.

Lembaga pendidikan pendidikan islam atau madrasah diniyah saat ini merupakan metamorfosa lembaga pendidikan islam tradisional. Lembaga pendidikan keislaman yang ada di Indonesia, seperti langgar (sebutan) di Madura setelah melalui proses dialektika yang sangat panjang, sejumlah lembaga pendidikan keagamaan mulai merubah arah kebijakannya. Sistem klasikal, yang awalnya diperkenalkan oleh pemerintah kolonial melalui sekolah-sekolah umum yang didirikannya di berbagai wilayah Nusantara juga diadopsi oleh lembaga pendidikan Islam.

Dan pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.⁶ Menurut Zainuddin Labai el-Junusi (1890-1924), yang pada tahun 1915 mendirikan sekolah agama sore yang diberi nama “Madrasah Diniyah” (*Diniyah School, al-Madrasah al-Diniyah*). Sistem klasikal seperti rintisan Zainuddin berkembang pula di wilayah Nusantara lainnya, terutama yang mayoritas penduduknya Muslim. Sejumlah

⁶ Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan

lembaga pendidikan pada masa penjajahan itulah yang kemudian bermetamorfosi mejaga madrasah pada jalur sekolah sekarang.

Peraturan Menteri Agama tumbuh pula madrasah-madrasah diniyah tipe baru, sebagai pendidikan tambahan berjenjang bagi murid-murid sekolah umum. Madrasah diniyah itu diatur mengikuti tingkat-tingkat pendidikan sekolah umum, yaitu Madrasah Diniyah Awwaliyah untuk murid Sekolah Dasar, Wustha untuk murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan ‘Ulya untuk murid Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya⁷ Madrasah diniyah dalam hal itu dipandang sebagailembaga pendidikan keagamaan klasikal jalur luar sekolah bagi murid-murid sekolah umum.

Berdasarkan Undang-undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah.Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama.Madrasah Diniyah termasuk ke dalam pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditindaklanjuti dengan disahkannya PP No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan memang menjadi babak baru bagi dunia pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia. Pemerintah secara

⁷PP nomor 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan

yuridis telah mengakui bahwa kegiatan pendidikan yang ada di kawasan tanah air menjadi bagian penting dalam memajukan negara.

Diterbitkannya peraturan perundangan tentang pendidikan agama dan keagamaan menadi angin segar dan landasan kongkrit bagi madrasah diniyah yang dinilai belum menemukan posisinya. Sebab, dalam pelaksanaannya diduga penyelenggaraan pendidikan diniyah yang ada tidak banyak diketahui bagaimana pola pengelolaannya. Tapi karakteristiknya yang khas menjadikan pendidikan ini layak untuk dimunculkan dan dipertahankan eksistensinya. Melihat pergeakan madrasah diniyah dari tahun ke tahun, setidaknya sudah ada beberapa karakteristik pendidikan diniyah khas Indonesia. Cita rasa madrasah diniyah dengan berbagai kegiatan keagamaannya yang luar biasa. **Pertama**, Pendidikan Diniyah Takmiliyah (*suplemen*) yang berada di tengah masyarakat dan tidak berada dalam lingkaran pengaruh pondok pesantren. Pendidikan diniyah jenis ini betul-betul merupakan kreasi dan swadaya masyarakat, yang diperuntukkan bagi anak-anak yang menginginkan pengetahuan agama di luar jalur sekolah formal. **Kedua**, pendidikan diniyah yang berada dalam lingkaran pondok pesantren tertentu, dan bahkan menjadi urat nadi kegiatan pondok pesantren. **Ketiga**, pendidikan keagamaan yang diselenggarakan sebagai pelengkap (*komplemen*) pada pendidikan formal di pagi hari. **Keempat**, pendidikan diniyah yang diselenggarakan di luar pondok pesantren tapi diselenggarakan secara formal di pagi hari, sebagaimana layaknya sekolah formal (Muhaimin, 2010 : 197).

Pendidikan merupakan wahana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Pemerintah telah berupaya membangun sektor pendidikan secara terencana, terarah dan bertahap serta terpadu dengan keseluruhan pembangunan kehidupan bangsa, baik ekonomi, iptek, sosial maupun budaya. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan beretika, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Bertolak dari kondisi demikian, memang sudah saatnya bagi seluruh komponen bangsa untuk memberikan perhatian lebih bagi penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagai media yang elementer tapi primer bagi pembentukan watak, kepribadian dan karakter bangsa dengan landasan etika dan moral yang kokoh

Penyiar (Messionaris) dakwah Islam itu adalah Walisongo sekitar abad ke-13 M.⁸ Mereka melakukan metode pendekatan dakwah Islam dengan cara beragam, ada yang membangun koneksi lewat jalur perdagangan, yang lebih lanjut kemudian jaringan itu dimanfaatkan untuk menyebarkan agama Islam. Ada pula yang melakukan pendekatan dengan cara menikahi wanita keturunan

⁸ Hasbullah, M, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 149

pribumi asli.⁹ Hebatnya lagi strategi dakwah yang dilakukan Walisongo, mampu mengadaptasikan nilai-nilai Islam dengan khazanah kebudayaan nenek moyang Indonesia pra-Islam.¹⁰

Contoh yang bisa diketengahkan adalah pembelajaran dengan model pesantren. Sebenarnya hal itu sudah ada pada masa Hindu. Hanya waktu itu umat Hindu lebih mengenal dengan sebutan Mandala. Mandala adalah sebuah asrama bagi para pertapa atau pelajar dari agama Siwa yang terletak di tengah-tengah hutan yang dipimpin oleh Dewa Guru.¹¹ Jadi pesantren oleh banyak kalangan dipandang sebagai kelanjutan dari bentuk Mandala pada masa Hindu.

Sekitar tahun 1910–1940 pesantren diharapkan pada masa dimana harus berjuang untuk merebut kemerdekaan, pesantren tampil sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pesantren-pesantren muncul pada masa ini banyak bertebaran di kampung-kampung dan merupakan respons atas hegemoni kolonial yang tiak memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak-hak dasarnya, antara lain pendidikan. Anti kolonialisme ini membangkitkan pertumbuhan pendidikan agama di bawah kepemimpinan dan bimbingan pesantren dan secara konsisten

⁹ Mustafa Kamal, “*Sejarah Islam di Indonesia*” dalam <http://www.dakwatuna.com2007> sejarah –islam-di-indonesia

¹⁰ Moestopo M. Habib (2001), *Kebudayaan Islam di Jawa Timur: Kajian Beberapa Unsur Budaya Masa Peralihan*, Jendela, Yogyakarta, hlm. 150

¹¹ Sutjiatiningsih, Sri & Slamet Kutoyo (1986), *Sejarah Pendidikan Jawa Timur*, Jendela, Yogyakarta, hlm. 51

para kyai kampung melakukan konfirmasi budaya dengan kaum penjahat saat ini.¹²

Dalam keterkaitan itu, sekolah formal lebih menekankan pada aspek pendidikan otak, dan belum maksimal memberikan penekanan terhadap aspek hati (batin) anak didik melalui pendidikan agama yang maksimal. Pendidikan agama (diniyah) menjadi salah satu jawaban dalam menopang pengembangan nilai-nilai agama masyarakat. Untuk masyarakat Madura, madrasah diniyah telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Madrasah diniyah hampir mayoritas diselenggarakan oleh masyarakat, dari dan untuk masyarakat pula, atau dikatakan berbasis masyarakat (Kuswandi, dkk, 2020 : 8). Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia¹³. Bahasan antara pesantren dan diniyah menjadi satu topik yang tidak bisa dipisahkan, karena pesantren dan diniyah berjalan di rel yang sama. Sama substansinya dan berbeda praktinya.

Pendidikan merupakan kunci sekaligus pembuka bagi perkembangan suatu bangsa, pendidikan yang maju dan kuat akan mempercepat terjadinya perubahan social. Namun jika sebaliknya pendidikan suatu bangsa mengalami kemunduran maka sudah dipastikan akan kontra produktif

¹² Agus Syafii, "Pesantren: Dulu dan Sekarang" dalam <http://www.mubarak-institute.blogspot.com> (11 September 2006)

¹³ PP Nomor 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan agama dan keagamaan Bab III Pasal 8 Poin 2

terhadap jalannya proses perubahan sosial suatu bangsa dan justru akan menimbulkan ketidakharmonisan tatanan sosial.

Pendidikan sangat penting bagi siapapun dan oleh siapapun karena pendidikan merupakan proses yang membantu diri untuk mengembangkan potensi yang sudah dimiliki sejak Tuhan menciptakan manusia, dari pentingnya pendidikan maka yang paling penting adalah pendidikan Agama, sebab pendidikan agama tidak saja membekali diri untuk menjadi manusia yang berilmu dan ahli dibidangnya, akan tetapi pendidikan agama juga memberikan bekal dan membentuk pola kepribadian yang Islami, berbudi luhur, berakhlak mulia dan beriman kepada Allah swt.

Keberadaan lembaga pendidikan Islam saat ini seperti madrasah dan pesantren merupakan sebuah kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya pendidikan Agama, terlepas dari itu juga ada juga lembaga pendidikan diniyah yang tidak kalah penting dalam membina dan membentuk muslim sejati, itulah yang sering disebut Madrasah Diniyah.

Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan, penagajaran dan pengetahuan agama Islam kepada peserta didik. Mulyono, Manajemen Administrasi Dan Organisasi Pendidikan, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2008), h. 234. 13 Sejalan dengan dinamika pembangunan bangsa di berbagai sektor, Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah harus dilakukan secara optimal.

Hal itu dimaksudkan demi terwujudnya Pendidikan Diniyah yang berkualitas, berdaya saing dan mampu menjadi pusat unggulan Pendidikan

Agama Islam dan Pengembangan masyarakat dalam rangka pembentukan watak dan kepribadian siswa sebagai Muslim dan Negara yang bertanggung jawab, dengan upaya-upaya yang dilakukan berupa peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan system pembelajaran serta peningkatan sumber daya pendidikan secara kualitatif dan kuantitatif. Namun pada era kekinian, terdapat diktonomi pendidikan umum dan pendidikan agama. Yang lebih ironis, terlihat dari prioritas yang diberikan oleh semua pihak (individu dan institusi) lebih kepada pendidikan umum.

Pendidikan umum diwakili oleh sekolah-sekolah umum, seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) sedangkan pendidikan agama diwakili oleh Madrasah, yang diantaranya Madrasah Diniyah. Pendidikan keagamaan berbentuk Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren telah disebut dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 30. Madrasah dan Pondok Pesantren diberikan ruang yang luas dalam praktek penyelenggaraan pendidikan nasioanl baik jalur formal, nonformal atau informal oleh Pemerintah/atau kelompok masyarakat.

Prospek tersebut sudah seharusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pelaksana pendidikan madrasah diniyah untuk berkiprah secara nyata dalam membangun sistem pendidikan nasional dengan dipayungi oleh berbagai kebijakan pemerintah.

Madrasah Diniyah Awaliyah adalah satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat

dasar dengan masa belajar 4 (empat) tahun dan jumlah jam belajar 18 (delapan belas) jam pelajaran seminggu. Madrasah Diniyah Awaliyah terdiri atas komponen-komponen yang saling terkait dan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan.

Berbagai input mulai dari siswa, guru, biaya, serta instrumental dan environ mental input lainnya harus dapat didayagunakan seefektif mungkin dalam proses transformasi, untuk menghasilkan output berupa peserta didik yang memiliki seperangkat nilai, sikap, pengetahuan serta keterampilan baru. Manajemen Kepala Madrasah sebagai administrator memegang kunci bagi perbaikan dari kemajuan Madrasah. Seorang kepala madrasah sebagai pemimpin harus mampu memimpin dan menjalankan peranannya agar segala kegiatan terkendali dan terarah dalam usaha inovasi dan mencoba ide-ide baru dan praktek- praktek baru dalam bentuk manajemen kelas yang lebih efektif dan efisien.

Kepala Madrasah sebagai administrator pendidikan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di Madrasah. Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, Kepala Madrasah hendaknya memahami, menguasai dan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan fungsinya sebagai administrator pendidikan.

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerjasama sesuai dengan rencana demi tercapainya tujuan yang telah Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h.106 15 ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting dalam manajemen, bahkan dapat dinyatakan, kepemimpinan adalah inti dari manajemen.

Maka sejak tahun 2016, pemerintah Kabupaten Sumenep menerapkan program unik yang dikenal dengan pendidikan berbasis nilai-nilai pesantren, yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan dalam bentuk Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah. Sejak diberlakukannya, Perbup Wajib Madin ini tahun 2016, tidak ada pilihan lain bagi satuan pendidikan, khususnya di wilayah kecamatan kota Sumenep untuk melaksanakannya sebaik mungkin, walaupun dengan persiapan dan kondisi yang terpaksa, karena Kecamatan Kota menjadi tempat program ini di-*pilot project*-kan dalam tahun pertama pelaksanaan program ini.

Sebagai program baru, Wajib Madin telah mendapatkan jatah anggaran yang cukup besar dari APBD Kab.Sumenep.Kabupaten Sumenep, termasuk salah satu daerah yang melaksanakan program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah untuk jenjang SDN, SMPN dan SMAN sejak tahun 2016. Hal itu didasarkan pada Peraturan Bupati SumenepNo.Nomor : 15 Tahun 2016, tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah. Peraturan tersebut, secara formal telah menjadi legitimasi tersendiri dalam pelaksanaan program pendidikan keagamaan ini di Kabupaten Sumenep.¹⁴

¹⁴Mohamad Suhaidi, “Implementasi Pendidikan Berbasis Nilai Pesantren Di Sekolah Umum (Analisis Terhadap Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Di Smpn 2 Sumenep Dalam Membentuk Siswa Berkarakter Religius)” dalam Jurnal Pelopor Pendidikan, volume 10, Nomor 1, Tahun 2018, hl.22

Menurut Mukhlisi bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep sebelum lahirnya undang-undang Pesantren nomor 18 tahun 2019, Kabupaten Sumenep telah mengawali dengan membuat Perbub tentang kebijakan wajib belajar pendidikan diniyah yang dilaksanakan bagi siswa di kabupaten Sumenep¹⁵

Sebagai kegiatan yang dimasukkan dalam Ekstra Kurikuler Wajib, maka Wajib Diniyah menjadi terobosan baru di dunia pendidikan Kabupaten Sumenep. Melalui kegiatan ini, agama telah dicoba untuk dihadirkan lebih maksimal dalam satuan pendidikan yang sebelumnya masih memiliki keterbatasan dalam memberikan pengenalan dan pemahaman terhadap anak didik.

Terobosan ini tentu saja diharapkan dapat menjadi solusi yang baik untuk meningkatkan pemahaman keagamaan peserta didik, yang pada gilirannya akan dapat membentuk generasi yang benar-benar memiliki karakter religius yang kuat. Melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya dan Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ketingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi¹⁶

¹⁵Mukhlisli, Mukhlisli , Muhammad Suahaidi , Sholehuddin , Achmad Yusuf.” *Efektivitas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Wajib Diniyah*”. Journal MULTICULTURAL of Islamic Education. Volume 4 Nomor 2 April 2021

¹⁶Peraturan pemerintah (PP) nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah Bab II pasal 2

Jauh sebelum lahirnya perbub tahun 2016 tentang wajib madin, madrasah diniyah Nurul Jadid Desa Pagrabatu Kecamatan saronggi Kabupaten Sumenep telah berjalan sesuai ketentuan. Madrasah Nurul Jadid Pagrabatu merupakan Madrasah Diniyah yang terletak diperkampungan yang relatif maju. Maju disisi ekonomi dan maju disisi pengetahuan tetapi tertinggal dalam mengembangkan potensi alam sekitar (merantau).

Dalam eksistensinya, pesantren pada umumnya bersifat mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah atau kekuasaan yang ada. Dengan sifat kemandiriannya inilah pesantren bisa memegang teguh kemurniannya sebagai lembaga pendidikan Islam. Pesantren pun tidak mudah disusupi oleh aliran atau paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Pada masa orde baru, bersama dengan dinamika politik dimana pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat pesantren, mulailah terjadi interaksi sosial antara pemerintah dan pesantren. Pemerintah sedikit menaruh perhatian kepada dunia pesantren, dan masyarakat pesantren-pun memanfaatkannya dengan berusaha memperoleh hak pembiayaan dari Anggaran Belanja Negara (ABN). Pada tahun 1980-an, orientasi peran sosial pesantren makin jelas yaitu melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.

Dinamika pesantren mengalami pasang surut seiring dengan perubahan lokal, nasional maupun global. Di akhir orde baru, pesantren memainkan peran penting dalam penguatan masyarakat sipil, melalui jaringan alumninya. Peta jaringan pesantren sangat beragam, pendirian OPRNOP (Organisasi Non Pemerintah) yang berafiliasi secara langsung atau tidak, pesantren dengan

komunitas-minoritas lokal, penguatan gender dan memperluas gagasan pluralisme, jaringan membentuk komunitas politik, dan kerja-kerja sosial bersama komunitas petani, buruh dan nelayan.

Sementara di era terkini, era dimana perkembangan teknologi dan globalisasi makin mengemuka, keberadaan pesantren juga mampu mengikuti trend aktual perkembangan zaman. Pesantren sudah mampu berdiri sejajar dengan lembaga formal umum negeri milik pemerintah. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyak tampilan para alumnus pesantren di tengah masyarakat sebagai pembawa obor dan penegak laju pembangunan. Mereka tampil dalam berbagai panggung baik sebagai tokoh agama, da'i, akademisi, penguasa hingga politisi.¹⁷

Diskripsi dinamika perjalanan pesantren sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang, tidak bisa digeneralisasi bahwa setiap pesantren bisa berbuat seperti itu. Ternyata ada sebagian kecil dari pesantren yang ada saat ini, masih belum terberdaya dan hingga sekarang menganut sistem lama, dalam banyak hal, semisal fasilitas dan kurikulum yang diberlakukan.

Sedikitnya ada tiga unsur utama penopang eksis dan tidaknya pesantren dalam pendidikan, yaitu kiai sebagai pendidik sekaligus pemilik pondok dan para santri, kurikulum pondok pesantren, dan sarana peribadatan serta pendidikan, seperti masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, dan bengkel-bengkel keterampilan.

¹⁷ <http://www.saidabdullah.com> (20 Oktober 2010)

Unsur-unsur tersebut mewujud dalam bentuk kegiatannya yang terangkum. Kajian pondok pesantren merupakan kesatuan kesatuan dalam legalitas undang-undang yaitu berlandaskan pada undang-undang dan peraturan pemerintah yang sama.

B. Fokus Penelitian

Dengan narasi tersebut, dalam penelitian ini dapat diajukan beberapa fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen pengelolaan Madrasah Diniyah Nurul Jadid desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi ?
2. Apa saja yang menghambat pelaksanaan manajemen pengelolaan Madrasah Diniyah Nurul Jadid Desa Pagarbatu Kec. Saronggi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana manajemen pengelolaan Madrasah Diniyah Nurul Jadid desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi ?
2. Untuk mendeskripsikan apa yang menghambat pelaksanaan manajemen pengelolaan Madrasah Diniyah Nurul Jadid Desa Pagarbatu Kec. Saronggi ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang mungkin dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini setidaknya akan dapat membantu memberikan gambaran tentang manajemen pengelolaan madrasah diniyah .

2. Secara khusus bagi penulis adalah selain syarat untuk menamatkan gelar Master, juga sebagai proses pembelajaran agar makin cakap melakukan penelitian apapun yang lebih penting dan aktual ke depan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Tesis, Syaiful Bahri (2020), *Total Quality Management Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Wustha Pondok Pesantren Al – Ishlah Besuki*. Penelitian ini bertujuan pada pelaksanaan TQM di Madrasah Diniyah formal ditingkat wustho yang dikelola oleh pondok pesantren Al-Ishlah Besuki. Penelitian tersebut termasuk penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan pelaksanaan Total Quality Management pendidikan diniyah formal ditingkat wustho.
2. Tesis, Ucu Kurniawan (1441 H. / 2020), *Penerapan Manajemen Pendidikan Diniyah Formal (PDF) di Pondok Pesantren Al- Munawaroh Pekanbaru*. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field Research*). Yang bertujuan untuk mengungkap dan memahami fenomena yang belum terjadi. Penelitian ini fokus pada penerapan fungsi *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* kurikulum yang diterapkan.
3. Tesis, Imam Ahmad Subki (2022), *Manajemen Pendidikan Formal di Pondok Pesantren Salafiyah Ar-Rahmah NU Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah*. Penelitian ini menjelaskan tentang pendidikan Diniyah formal dengan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut fokus pada penerapan *planning*, *organizing*, *actuating*

dan controlling. Namun terdapat kekurangan di manajemennya dibidang kurikulumnya.

4. Tesis, Hasanah (2019), manajemen kurikulum madrasah diniyah takmiliah awaliyah (MDTA) Riyadul fata Tembung Raja Salem Brebes. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian fokus pada pola dan manajemenn kurikulum yang diterapkan pada MDTA Riyadul Fata.
5. Jurnal, Winda dkk (2018), Manajemenn madrasah diniyah Nurul Huda Krajan Krebet Jambon Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan secara komprehensif untuk meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Diniyah Nurul Huda Krajan Krebet Jambon Ponorogo.

1. 1 Tabel Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Tesis, Syaiful Bahri (2020)	Total Quality Management Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Diniyah Formal	Objek penelitian di pondok pesantren Al-Ishlah Besuki	Analisis Manajemen Pengelolaan Madrasah Diniyah
2	Tesis, Ucu Kurniawan (1441 H. / 2020)	Penerapan Manajemen Pendidkan Diniyah Formal (PDF)	Objek penelitian di Pondok Pesantren Al-Munawaroh Pekanbaru.	Analisis Manajemen Pengelolaan Madrasah Diniyah
3	Tesis, Imam Ahmad Subki (2022)	Manajemen Pendidikan Formal di Pondok	Objek penelitiandi Pondok Pesantren	Analisis Manajemen Pengelolaan Madrasah

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
		Pesantren Salafiyah Ar-Rahmah	Salafiyah Ar-Rahmah NU Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah	Diniyah
4	Tesis, Hasanah (2019)	Manajemen kurikulum MDTA Riyadul Fata	Objek penelitian di MDTA Riyadul Fata tembongraja Salem Brebes	Analisis Manajemen Pengelolaan Madrasah Diniyah
5	Jurnal, winda dkk (2018)	Manajemen Madrasah Diniyah Nurul Huda	Objek penelitian di madrasah Diniyah Nurul Huda Krajan krevet Jambon Ponorogo	Analisis Manajemen Pengelolaan Madrasah Diniyah

F. Definisi Operasional

1. Manajemen

Manajemen adalah suatu cara atau seni mengelola sesuatu yang dikerjakan oleh orang lain. Untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Secara etimologis, kata 'manajemen' berasal dari bahasa Inggris, yakni *management*, yang dikembangkan dari kata *to manage*, yang artinya mengatur atau mengelola.

2. Pengelolaan

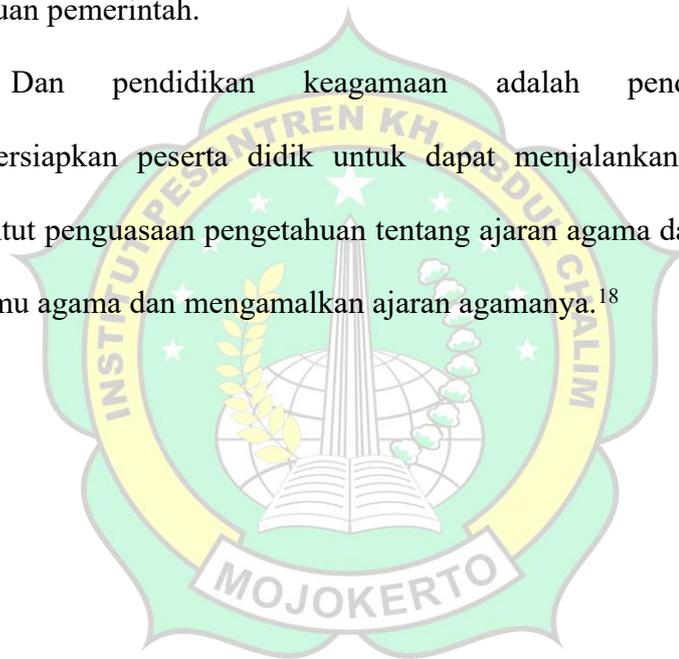
Kata “ Pengelolaan “ berasal dari kata “ kelola “ adalah mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang

memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Poerwadarminta, 2006).

3. Madrasah Diniyah

Lembaga Pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, jenis pendidikan diluar ketentuan pemerintah.

Dan pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.¹⁸



¹⁸ Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan